



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

**PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 180/Kep.091 - BagKum/2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2025**

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2025.
- KEDUA : Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan usulan Perangkat Daerah dan untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Agenda penyampaian Program Pembentukan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Wali Kota meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota.

- KELIMA : Kepada Perangkat Daerah pemrakarsa atau terkait langsung secara substansi dengan agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota untuk segera mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dan memperhatikan tahapan/mechanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Januari 2025
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 180/Kep.091 - BagKum/2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2025

RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
1.	Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Daerah		✓			BKAD	2025	
2.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		✓			BKAD	2025	
3.	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		✓			BKAD	2025	
4.	Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah		✓			BKAD	2025	
5.	Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024		✓			BKAD	2025	
6.	Perubahan Atas Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pencatatan dan Pelaporan Barang Persediaan			✓		BKAD	2025	
7.	Pengamanan Barang Milik Daerah		✓			BKAD	2025	

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
8.	Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Persediaan		✓			BKAD	2025	
9.	Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai		✓			BKPSDM	2025	
10.	Pemberian Tambahan Pegawai Negeri Sipil		✓			BKPSDM	2025	
11.	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		✓			BKPSDM	2025	
12.	Ketentuan Penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung		✓			BKPSDM	2025	
13.	Ikatan Dinas bagi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dari Formasi Umum dan Lulusan Tinggi Sekolah Kedinasan		✓			BKPSDM	2025	
14.	Perubahan Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi		✓			BKPSDM	2025	
15.	Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil		✓			BKPSDM	2025	

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
16.	Penyelenggara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung		✓			BKPSDM	2025	
17.	Pengelolaan Jasa Tenaga Pendukung Kerja Pelayanan Publik (TPKPP)		✓			BKPSDM	2025	
18.	Manajemen Karir Pegawai Negeri Sipil		✓			BKPSDM	2025	
19.	Tata Kelola Bandung Corporate University		✓			BKPSDM	2025	
20.	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN)		✓			BKBP	2025	
21.	Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Bandung		✓			BKBP	2025	
22.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan		✓			Bappelitbang	2025	

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
23.	Perhitungan Nilai Sewa Reklame		✓			Bapenda	2025	
24.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko Tahun 2026		✓			Inspektorat	2025	
25.	Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Bandung		✓			Sekretariat DPRD	2025	
26.	Bangunan Gedung		✓			Disciptabintar	2025	
27.	Petunjuk Teknis Atas Perda tentang Penyelenggaraan Reklame		✓			Disciptabintar	2025	
28.	Tata Cara Penghitungan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Gedung		✓			Disciptabintar	2025	
29.	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Gedung		✓			Disciptabintar	2025	
30.	Peraturan Zonasi		✓			Disciptabintar	2025	
31.	Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang		✓			Disciptabintar	2025	
32.	Pembinaan Pengelolaan dan Ketentuan Sanksi Pelanggaran Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Bandung		✓			Disdagin	2025	

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
33.	Mekanisme Kerja Tim Terpadu Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol		✓			Disdagin	2025	
34.	Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Tera Ulang		✓			Disdagin	2025	
35.	Arsip Terjaga		✓			Disarpus	2025	
36.	Pedoman Penggunaan Aplikasi Sisten Informasi Dinamis Terintegrasi		✓			Disarpus	2025	
37.	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi		✓			Disarpus	2025	
38.	Klasifikasi Arsip		✓			Disarpus	2025	
39.	Pengelolaan Arsip Aktif		✓			Disarpus	2025	
40.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital		✓			Disarpus	2025	
41.	Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perhubungan Kota Bandung		✓			Dishub	2025	
42.	Standar Pelayanan Miniman Layanan Angkutan Kota		✓			Dishub	2025	
43.	Angkutan Feeder		✓			Dishub	2025	
44.	Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		✓			Dishub	2025	

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
45.	Pemindahan Kendaraan, Prosedur Perizinan Derek Umum dan Kerja sama Pengelolaan Kendaraan Derek		✓			Dishub	2025	
46.	Tarif Lokasi Parkir		✓			Dishub	2025	
47.	Kendaraan Bermotor Umum Khusus Angkutan yang dikelola oleh UPTD BLUD Dinas		✓			Dishub	2025	
48.	Transformasi Angkutan Umum		✓			Dishub	2025	
49.	Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk di Daerah kota		✓			Dinkes	2025	
50.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1457 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan untuk Penduduk Kota Bandung		✓			Dinkes	2025	
51.	Tenaga Ahli Bidang Pendidikan		✓			Disdik	2025	
52.	Penerimaan Peserta Didik Baru		✓			Disdik	2025	
53.	Bantuan Sosial Pendidikan Untuk Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan		✓			Disdik	2025	
54.	Bantuan Sosial Pendidikan Untuk Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan		✓			Disdik	2025	
55.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan		✓			Disdukcapil	2025	

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
56.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan		✓			Disdukcapil	2025	
57.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung		✓			Bag.Organisasi	2025	
58.	Proses Bisnis		✓			Bag.Organisasi	2025	
59.	Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah		✓			Bag.Organisasi	2025	
60.	Pembentukan dan Pemberdayaan Ruang Kreatif Kota Bandung		✓			Disbudpar	2025	
61.	Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kegiatan Usaha Ekonomi Kreatif		✓			Disbudpar	2025	
62.	Standar Operasional Stauan Polisi Pamong Praja		✓			Satpol PP	2025	

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
63.	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Biaya Paksa Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019		✓			Satpol PP	2025	
64.	Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat dan Pembinaan Pengawasan dalam Ketertiban Umum, Kententraman dan Perlindungan Masyarakat		✓			Satpol PP	2025	
65.	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas		✓			Dinsos	2025	
66.	Standar Infrastruktur yang ramah Bagi Penyandang Disabilitas		✓			Dinsos	2025	
67.	Rincian Pelayanan Bidang Pangan Pertanian dan Perikanan		✓			DKPP	2025	
68.	Peran Forum Anak Sebagai Pelopor, Pelapor dan Partisipasi Anak Dalam Proses Pembangunan Daerah		✓			DP3A	2025	
69.	Senandung Perdana		✓			DP3A	2025	

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
70.	Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan di Kota Bandung		✓			DP3A	2025	
71.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan		✓			Dispora	2025	
72.	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2025		✓			DPKP	2025	
73.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Modal		✓			DPMPTSP	2025	
74.	Tata Cara Pemeriksaan Sebab Kebakaran		✓			DPKB	2025	
75.	Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana		✓			DPKB	2025	
76.	Tata Naskah Dinas Elektronik		✓			Diskominfo	2025	
77.	Tugas dan Wewenang Direksi Perusahaan umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung		✓			Perumda Pasar Juara	2025	
78.	Pengaturan Angkutan Feeder (Pengumpan Sistem Angkutan Umum Massal)		✓			Dishub		

NO. 1	TENTANG 2	MATERI POKOK 3	STATUS 4		PELAKSANAAN 5	Perangkat Daerah 6	TARGET PENYAMPAIAN 7	KET 8
			BARU	UBAH				
79.	Pengelolaan Pasar di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung		✓			Perumda Pasar Juara	2025	

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002